

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

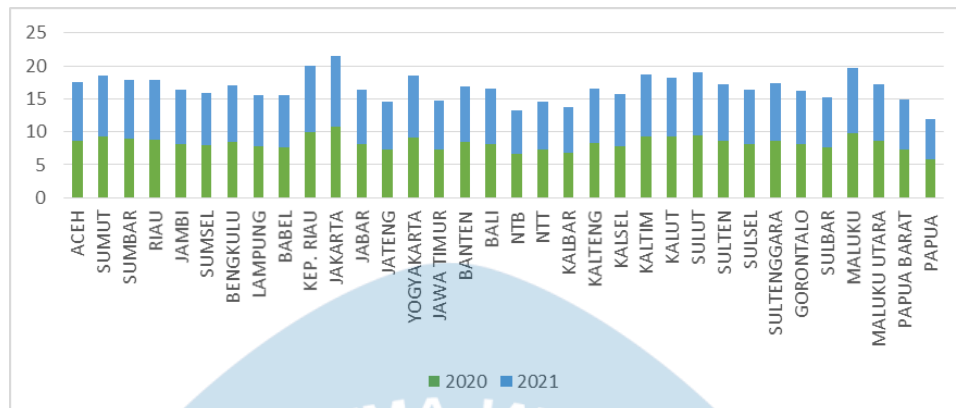
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana suatu negara secara terus menerus mengubah kondisi ekonominya untuk mencapai keadaan yang dianggap lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menunjukkan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin membaik dan akan berdampak baik pula terhadap produktivitas dan produksi, serta juga meningkatkan upah. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kenaikan PDRB per kapita yang dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk akan tercapai jika PDRB per kapita meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk.

Kesetaraan yang berarti bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat menikmati hasil pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi saat ini belum menjangkau seluruh aspek masyarakat. Permasalahan mendasar yang masih ada adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disisi lain adanya aspek yang menyangkut aspek pendidikan, ekonomi dan politik serta disparitas upah (Šilingienė, 2014).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) (2016) menunjukkan bahwa memasuki pasar tenaga kerja adalah salah satu aspek penting dari analisis ketidaksetaraan gender karena mencerminkan sejauh mana

negara memberikan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengurangi ketidaksertaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terbentuklah *Millenium Development Goals* (MDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015 dengan tujuan untuk mencapai kesehatan, akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial serta dapat membuat keputusan di sektor publik dan swasta (BPS, 2021). Selain itu pemberdayaan perempuan juga diperlukan untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Inpres No. 9 Tahun 2000). Pemberdayaan perempuan penting untuk pertumbuhan ekonomi karena menyumbang hampir setengah dari sumber daya manusia di Indonesia serta peran perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain yang semakin meningkat akan berdampak pada semakin majunya pertumbuhan ekonomi negara serta mengurangi kemiskinan global.

Tingkat pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP selama 9 tahun dan tamat SMA selama 12 tahun yang tersaji pada gambar 1.1 sebagai berikut:

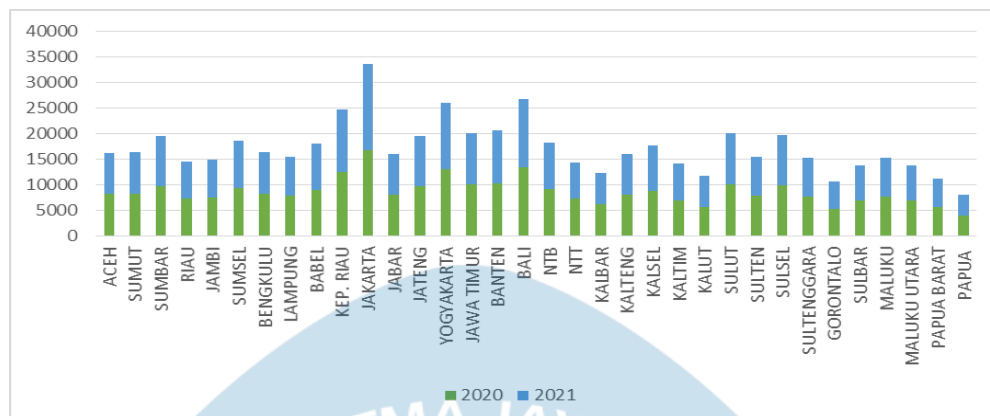


Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Indonesia Tahun 2020-2021

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pencapaian angka rata-rata lama sekolah perempuan terus mengalami kenaikan. Tahun 2020 hingga tahun 2021 rata-rata lama sekolah perempuan terendah adalah provinsi Papua sebesar 5,88 tahun 2020 dan 6 tahun 2021 atau setara dengan kelas 6 SD/ sederajat sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,76 tahun 2020 dan 10,83 tahun 2021 atau setara dengan kelas 11 SMA/ sederajat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin lama jenjang pendidikan yang ditamatkan. Meningkatnya pendidikan perempuan akan meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja perempuan serta mampu memperbaiki kesejahteraan dalam tercapainya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan suatu negara.

Pengeluaran perkapita merupakan pertimbangan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi biaya rumah tangga. Kesenjangan upah mengakibatkan tingkat konsumsi perempuan menurun dan terbentuknya pengeluaran perkapita yang rendah yang tersaji pada gambar 1.2 sebagai berikut:

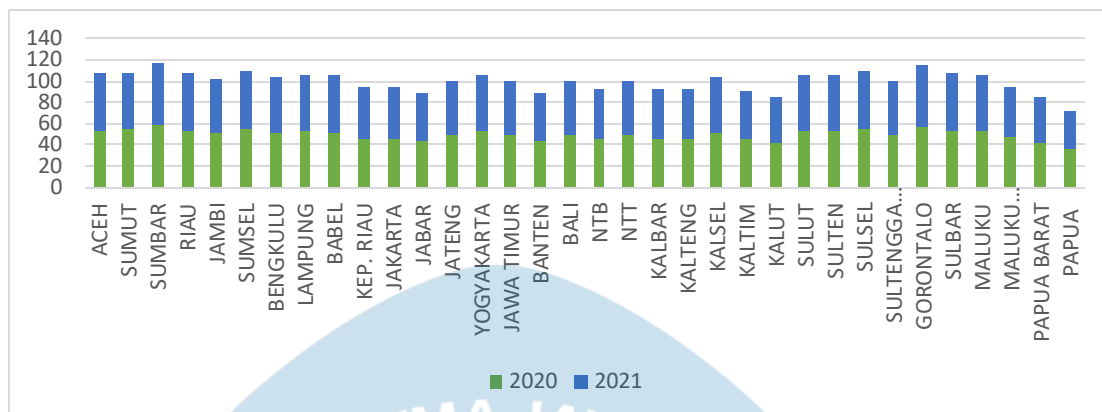


Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.2 Pengeluaran per Kapita Perempuan di Indonesia Tahun 2020-2021

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita perempuan terus mengalami peningkatan yang menandakan daya beli masyarakat juga meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 hingga tahun 2021 tingkat pengeluaran perkapita perempuan terendah adalah provinsi Papua sebesar 3.999 tahun 2020 dan 4.007 tahun 2021 sedangkan tingkat pengeluaran perkapita perempuan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 16.742 tahun 2020 dan 16.993 tahun 2021. Peningkatan pengeluaran perkapita disebabkan pertumbuhan industri manufaktur, meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran sehingga memberikan dampak pada ekonomi yang lebih baik bagi suatu negara.

Tenaga Profesional merupakan seseorang yang ahli dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman untuk menerapkan ilmu dalam memecahkan masalah yang muncul. Seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, persentase perempuan sebagai tenaga profesional terus mengalami peningkatan yang tersaji pada gambar 1.3 sebagai berikut:

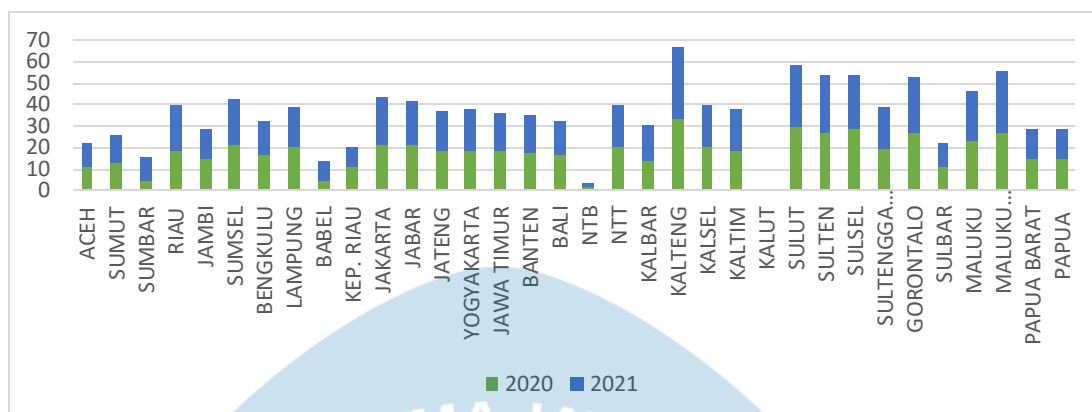


Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.3 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Indonesia Tahun 2020-2021

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa perempuan sebagai tenaga profesional mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 walaupun angka kenaikannya kecil. Tahun 2020 hingga tahun 2021 tingkat tenaga profesional terendah adalah provinsi Papua sebesar 35,48 persen tahun 2020 dan 37,36 persen tahun 2021 sedangkan tingkat tenaga profesional tertinggi adalah Provinsi Sumatra Barat sebesar 58,97 persen tahun 2020 dan 59,09 persen tahun 2021. Kenaikan persentase perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan besarnya gerakan emansipasi perempuan untuk mendapatkan haknya yang diperkuat dengan penurunan tingkat kelahiran, peningkatan harapan hidup saat lahir, lama sekolah perempuan, sumbangan pendapatan perempuan serta peningkatan kualitas modal perempuan sehingga berdampak pada kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan nasional (Wisnujati, 2020).

Keterlibatan perempuan dalam parlemen bertujuan untuk mengukur akses perempuan terhadap peluang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang tersaji pada gambar 1.4 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.4 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Indonesia Tahun 2020-2021

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan. Tahun 2020 hingga tahun 2021 provinsi dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian hanya 1,56 persen tahun 2020 dan 1,59 persen tahun 2021 sedangkan provinsi dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi adalah provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,33 persen tahun 2020 dan tahun 2021. Meskipun keterwakilan perempuan dalam politik meningkat namun kebijakan yang dibuat tidak menjamin mendukung kebijakan perempuan dan posisi perempuan yang belum menempati posisi strategis.

Ketimpangan gender masih sering menjadi pembatas bagi perempuan untuk memilih yang dapat memberikan perempuan batasan dalam memberikan partisipasinya dalam pembangunan maupun dalam memperoleh manfaat dari adanya sebuah pembangunan. Ketimpangan gender pada kenyataannya masih sering terjadi di Indonesia dalam semua aspek kehidupan akibat masih adanya kesenjangan dalam memperoleh manfaat akan hasil pembangunan oleh perempuan

terhadap laki-laki yang dapat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yaitu untuk memperoleh pendidikan yang tersaji pada gambar 1.5 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) di Indonesia Tahun 2017-2021

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Indonesia masih terjadi kesenjangan baca tulis dan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki berada diatas rata-rata lama sekolah perempuan, di mana angka rata-rata lama sekolah laki-laki tertinggi sebesar 8,92 atau setara dengan kelas 3 SMP dan untuk rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi sebesar 8,17 atau setara dengan kelas 2 SMP. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah pertimbangan prioritas bahwa nilai ekonomi anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki harus mencari nafkah sehingga harus dibekali pendidikan yang lebih dibandingkan anak perempuan.

Di sisi lain dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan ketimpangan gender dari sisi kesempatan kerja yang

berhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. TPAK antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.6 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin (Persen) di Indonesia Tahun 2017-2021

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa masih terdapatnya gap antara TPAK laki-laki dan perempuan, hal ini menandakan masih terdapatnya kesenjangan. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berada 10-20 persen di atas tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu untuk tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berkisar 69,39-85,13 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berkisar 55,51-66,36 persen. TPAK perempuan dalam angkatan kerja memang masih rendah yang menunjukkan terdapat pula perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab diantaranya adalah penduduk laki-laki di Indonesia yang sudah mencapai usia kerja dan yang telah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga secara langsung menjadi pelaku dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan bekerja sehingga memiliki perbedaan tanggung jawab

inilah yang membuat gap antara TPAK antara laki-laki dan perempuan semakin tinggi.

Selain itu perempuan juga harus berpartisipasi dalam aspek politik. Menurut Martini *et al.* (2021) hak perempuan di parlemen tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 mengatur keterwakilan perempuan di parlemen yaitu minimal 30 persen untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan. Penting agar perempuan di dunia parlemen ditingkatkan karena posisi perempuan dalam pengambilan keputusan politik memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan suara dan kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan dalam politik dapat berperan mencerdaskan generasi penerus sehingga akan meningkatkan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berasumsi bahwa pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas. Tujuan dilakukannya pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu meningkatnya kualitas perempuan juga dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi dan menambah kapasitas perempuan dalam kelembagaan masyarakat baik dalam aparaturnya pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ketenagakerjaan masih merupakan isu dan permasalahan yang sering terjadi sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran akan dampak yang didapatkan dalam pemberdayaan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2017-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, perempuan sebagai tenaga profesional, dan keterlibatan perempuan dalam parlemen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pengeluaran per kapita perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh perempuan sebagai tenaga profesional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh keterlibatan perempuan dalam parlemen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan serta mempertimbangkan mengenai kesetaraan gender pada tiap provinsi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Perempuan

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan potensi, kapasitas serta kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembandingan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pertumbuhan ekonomi ataupun untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.

2. Diduga pengeluaran per kapita perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.
3. Diduga perempuan sebagai tenaga profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.
4. Diduga keterlibatan perempuan dalam parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2021.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi studi-studi empiris yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai literatur dan landasan berpikir, penelitian-penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pemaparan berupa objek, sumber dan jenis penelitian, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil analisis data, hasil penelitian yang diuji serta hasil interpretasi dari hasil yang telah diuji beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah diuji serta saran terkait permasalahan dalam penelitian.

